

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

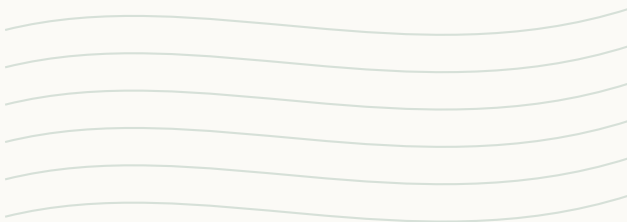


LPT

Laporan Pelaksanaan Tugas

**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

TAHUN 2025



Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkanan

Telp/Fax (0271) 495142 Karanganyar 57712

Laman: dispertanpp.karanganyarkab.go.id

Pos-el: dispertanpp@karanganyarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

*Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkanan
Telp/Fax (0271) 495142 Karanganyar 57712
Laman : dispertanpp.karanganyarkab.go.id
Pos-el : dispertanpp@karanganyarkab.go.id*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian tahun 2025 di Kabupaten Karanganyar berfokus pada peningkatan produksi (tanaman pangan utama, hortikultura dan peternakan), penguatan sarana dan prasarana (irigasi, alat pertanian, teknologi), peningkatan kesejahteraan petani (akses modal, kualitas SDM, promosi), dan ketahanan pangan (diversifikasi pangan, lumbung pangan). Dalam hal ini sudah sejalan dengan pembangunan pertanian tahun 2025 fokus pada ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan modernisasi pertanian melalui berbagai strategi utama. Strategi ini mencakup kolaborasi antar kementerian untuk optimalisasi sumber daya air (bendungan dan irigasi), peningkatan produktivitas (bibit unggul, pemupukan dan pompanisasi) serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Hasilnya Indonesia mencapai rekor produksi padi dan surplus beras tanpa impor pada tahun 2025, yang didukung oleh sinergi berbagai pihak dari pemerintah, daerah hingga petani.

Sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tahun 2024-2026.

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pangan (urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan), urusan pertanian (urusan pilihan bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang sarana dan prasarana dan bidang perkebunan) dan urusan perikanan (urusan pilihan kelautan dan perikanan).

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kabupaten Karanganyar juga di upayakan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan serta sebagai hasil kinerja kepada masyarakat juga sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2025. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025 merupakan laporan yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran Tahun 2025 sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kepada Bupati Karanganyar, yang bertujuan untuk menginformasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar disusun berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang

pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan,
- d. Pelaksanaan administrasi Dispertan PP, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar masuk dalam Urusan Pilihan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang pangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176 Tanggal 27 Desember 2024);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 187 Tanggal 03 Oktober 2025);
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31 Tanggal 27 Desember 2024);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 39 Tanggal 03 Oktober 2025);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Starategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024- 2026.
6. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a) Sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selama 1 (satu) Tahun Anggaran Tahun 2025.

- b) Memberikan gambaran dan sebagai input bagi pemerintah daerah dalam mengukur capaian kinerja dan hasil yang telah dicapai dari berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025.
- c) Sebagai bentuk tanggung jawab Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.
- d) Sebagai laporan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025.
- e) Memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas sebagai berikut :

- a) Menginformasikan pencapaian indikator yang telah dilaksanakan tahun 2025 yang telah dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja.
- b) Mengendalikan dinas secara efektif dan efisien sampai pada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c) Sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- d) Sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- e) Sebagai bahan bagi bupati untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

BAB II

DESKRIPSI DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang di tugaskan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan,
- d. Pelaksanaan administrasi Dispertan PP, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Standard Operating Procedure (SOP)

SOP merupakan salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan keputusan, yang mana keberadaannya merupakan suatu keharusan. SOP adalah suatu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan yang mencakup semua urutan proses pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. SOP Pengelolaan Arsip
2. SOP Kenaikan Pangkat
3. SOP Pelayanan Tamu
4. SOP Surat Masuk
5. SOP Surat Keluar
6. SOP Pelayanan Permohonan Informasi
7. SOP Kartu Suami dan Kartu Istri
8. SOP Kenaikan Gaji Berkala
9. SOP Pengajuan Keberatan Informasi
10. SOP Penyusunan LKjIP
11. SOP Penyusunan Rancangan RKA
12. SOP Penyusunan Renja
13. SOP Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Tembakau (AUTT)
14. SOP Pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT untuk buruh tani tembakau
15. SOP Pelaksanaan Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Komoditas Perkebunan
16. SOP Pelaksanaan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman/OPT Organisme Pengganggu Tanaman pada bidang perkebunan.

17. SOP Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP)
18. SOP Penyusunan Pemetaan Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security ang Vulnerability Atlas/FSVA)
19. SOP Penanganan Daerah Rawan Pangan (P-DRP)
20. SOP Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
21. SOP Penyusunan Laporan Norma Bahan Makanan (NBM)
22. SOP Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM)
23. SOP Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
24. SOP Monitoring dan Evaluasi Rantai Pasok Pangan Strategis
25. SOP Pemantauan Data Stok, Pasokan dan Harga Pangan Strategis Menjelang Hari Besar, dan Keagamaan Nasional (HBKN)
26. SOP Monitoring dan Analisa Data Stok, Pasokan dan Harga Pangan Strategis
27. SOP Monitoring Ketersediaan dan Akses Pangan
28. SOP Penyimpanan dan Perawatan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPDes)
29. SOP Penyimpanan dan Perawatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
30. SOP Pelayanan Penyaluran bantuamn Pangan Pemerintah Berdasarkan Usulan Kecamatanb (BOttom UP)
31. SOP Monitoring dan Evaluasi Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)
32. SOP Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi melalui Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, Sehat dan Aman (B2SA) Berbahan Sumber Daya Lokal
33. SOP Tata Cara Pengusulan Sesuatu Sumberday Genetik Tanaman Pangan Varietas Hasil Pemuliaan, dapat Ditetapkan sebagai Pangan Lokal
34. SOP Penyusunan Laporan Pola Pangan Harapan (PPH)
35. SOP Pelayanan Penyaluran Bantuan Stimulan Alat Pengolahan Pangan Lokal (APPL)

36. SOP Monitoring dan Pengendalian Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL)
37. SOP Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL)
38. SOP Pengawasan Keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)
39. SOP Pelayanan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
40. SOP Pengawasan PSAT Keamanan dan Mutu Post-Market
41. SOP Monitoring/Pemantauan Pemenuhan Komitmen
42. SOP Pengendalian Dokumen OKKPD
43. SOP Sosialisasi Standar/Regulasi Keamanan dan Mutu PSAT kepada Retail Tradisional dan Retail Modern
44. SOP Pengujian Pengawasan Keamanan pangan Segar (Uji Cepat Residu Pestisida) di Pasar Tradisional dan Pasar Modern
45. SOP Sosialisasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar
46. SOP Penerbitan Sertifikasi Label Hijau PSAT-PDUK, dan Sertifikasi Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)
47. SOP Verifikasi Calon Penerima Calon Lolkasi (CPCL)
48. SOP Pelayanan Penjualan Benih Ikan
49. SOP Produksi Benih Ikan
50. SOP Penerbitan Tanda Daftar Kelompok Perikanan
51. SOP Pengambilan Sampel
52. SOP Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Luar Daerah
53. SOP Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dari Dalam Daerah
54. SOP Pelayanan Pasif Puskesmas
55. SOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Juru Sembelih Halal
56. SOP Penanganan Wabah Penyakit Hewan Menular Bahaya
57. SOP Pelayanan Aktif Puskesmas
58. SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Ijin Praktek Dokter Hewan/Tenaga Paramedik Veteriner
59. SOP Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)
60. SOP Asistensi Teknologi Reproduksi (ATR)

61. SOP Pelayanan Inseminasi Buatan
62. SOP Mekanisme Penyaluran Dana Hibah
63. SOP Pemberian Surat Rekomendasi
64. SOP Rumah Potong Hewan (RPH)
65. SOP Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan Ayam
66. SOP Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium Kesehatan nHewan Ternak Besar/Pemeriksaan Hewan di Pasar Hewan
67. SOP Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan Babi
68. SOP Penjualan Produksi Usaha Daerah Straw, Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan
69. SOP Pemakaian Kekayaan Daerah Penggunaan Fasilitas Rumah Potong Hewan dan Pemerikaan Hewan Sebelum di Potong.
70. SOP Penyaluran Dana Hibah Bidang Pertanian
71. SOP Pemberian Surat Rekomendasi Usaha Pertanian (Penagkar/Pengedar Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura)
72. SOP Pendaftaran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
73. SOP Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani padi (AUTP)
74. SOP Pengajuan Bantuan Sarana Pertanian
75. SOP Pengajuan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
76. SOP Permohonan Rekomendasi Proposal Prasarana Pertanian
77. SOP Permohonan Rekomendasi Proposal Alat dan Mesin Pertanian
78. SOP Permohonan Pupuk Bersubsidi

C. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Karanganyar yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yaitu :

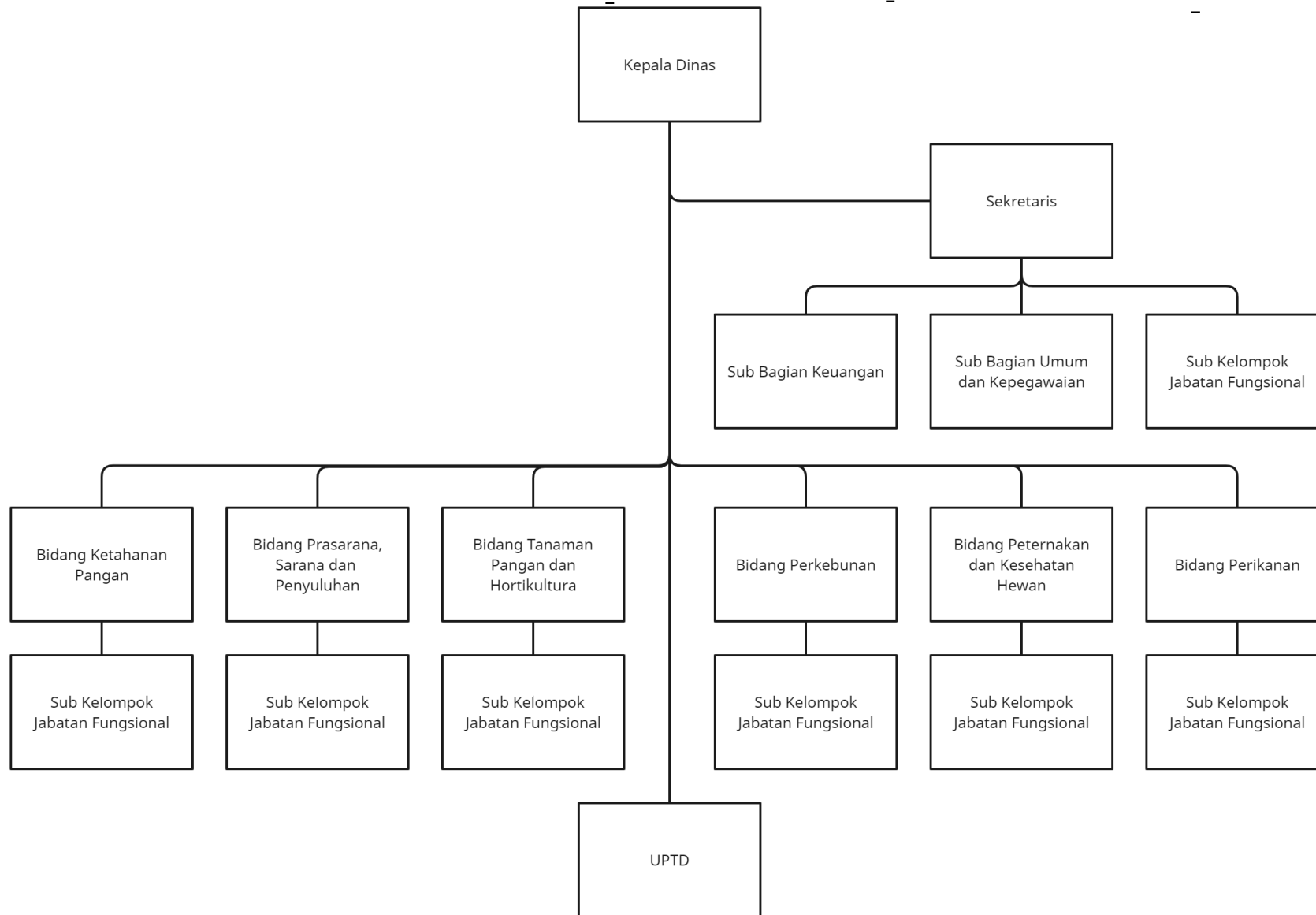
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176 Tanggal 27 Desember 2024);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 187 Tanggal 03 Oktober 2025);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31 Tanggal 27 Desember 2024);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 39 Tanggal 03 Oktober 2025);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 49);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024- 2026.

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 13).
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025.
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025.

D. Struktur Organisasi

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar di tunjukkkan pada bagan berikut :



E. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang dilaksanakan

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Per Desember 2025 di dukung oleh pegawai sebanyak :

1. PNS : 93 orang
2. CPNS : 6 orang
3. PPPK Teknis : 9 orang
4. PPPK Penyuluh : 54 orang
5. THL Kabupaten : 71 orang
6. PNS Pusat : 2 orang
7. PPPK Pusat : 1 orang
8. THL Pusat : 1 orang

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

Daftar Pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sesuai urusan sebagai mana di bawah ini :

a. Urusan Pertanian

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
1	E. Wihartomo, S.Pt., M.M.	19710909 199803 1 007	Sekretaris Dinas	PNS	Pembina Tingkat 1 - IV/b
2	Dr. Feriana Dwi Kurniawati, S.P., M.Si	19810226 200501 2 015	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	PNS	Pembina Tingkat 1 - IV/b
3	Dadi Utomo, S.I.P., M.M.	19681028 198903 1 009	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	PNS	Pembina - IV/a
4	Nur Ernie Rohmawaty, S.P., M.M.	19800503 200312 2 006	Kepala Sub Bagian Keuangan	PNS	Pembina - IV/a
5	Joko Sumartono, S.P.	19651205 198802 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	PNS	Pembina Utama Muda - IV/c

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
6	Mulyono, S.P.	19671012 198903 1 010	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	PNS	Pembina Utama Muda - IV/c
7	Usep Setiawan, S.T.P.	19670306 198802 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	PNS	Pembina Tingkat 1 - IV/b
8	drh. Fatkhur Rakhman	19750729 200312 1 008	Medik Veteriner Ahli Madya	PNS	Pembina Tingkat 1 - IV/b
9	Joko Wiyono, S.P.	19661212 199301 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	PNS	Pembina - IV/a
10	Rusnawaty Umanailo, S.P., M.Si	19740117 199303 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Pembina - IV/a
11	Sukarti, S.T.P.	19670523 199303 2 006	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	PNS	Pembina - IV/a
12	Ida Suyamtiningsih, S.Pt, M.M.	19721011 199803 2 011	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	PNS	Pembina - IV/a
13	Mohamad Hidayat Rusyadi, S.Hut., M.T.	19750912 200003 1 004	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	PNS	Pembina - IV/a
14	drh. Sutyarmo	19720125 200312 1 006	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Pembina - IV/a
15	Vitriawati, S.P., M.Si	19810731 200902 2 004	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	PNS	Pembina - IV/a
16	drh. Nurul Pratiwi	19860724 201101 2 014	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Pembina - IV/a

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
17	Sutarni, S.Pt	19690207 198903 2 002	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
18	Uswatun Khasanah, S.Pt	19700417 199603 2 002	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
19	Lucia Ambar Kusumaningrum, S.E.	19790624 199803 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Keuangan	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
20	Siti Masrokah, S.P.	19771103 200003 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
21	Sudaryanto, S.P.	19740906 200501 1 010	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
22	Novie Syaiful Hidayat, S.P., M.Eng	19821124 200902 1 005	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
23	drh. Jaka Mulyono	19750819 201001 1 012	Medik Veteriner Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
24	Eni Rohmawati, S.P.	19760810 201001 2 011	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
25	Singgih Girianto, S.E., M.M.	19781117 201001 1 009	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
26	Wahyu Budi Nurani, S.P.	19790513 201001 2 010	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
27	drh. Linda Christina Indriyanti	19820405 201001 2 027	Medik Veteriner Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
28	Leni Sukowati, S.E., M.M.	19820410 201001 2 027	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Keuangan	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
29	Agustina Sulistyaningsih, S.P.	19770221 201001 2 011	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
30	RA. Maria Veronica Anindyo Retno Puri, S.P.	19810610 201001 2 028	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
31	Nurwitomo, S.Pt	19810623 201001 1 016	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
32	Ikhsan Aminudin, S.P.	19830728 201001 1 023	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
33	Faria Dhani Oktawanti, S.P.	19851025 201001 2 026	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
34	Sri Rahayu, S.P.	19860112 201001 2 023	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
35	Ir. Alfian Putra DN, S.Pt	19860624 201001 1 010	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
36	Yustia Lukasari, S.H., S.E.	19761102 201101 2 005	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Keuangan	PNS	Penata Tingkat 1 - III/d
37	Supar, A.Md	19680825 199003 1 004	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan	PNS	Penata - III/c

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAAN	PANGKAT/ GOLONGAN
			Kesehatan Hewan		
38	Anik Darmawati, S.P.	19780211 201101 2 006	Penyuluh Pertanian Muda	PNS	Penata - III/c
39	Wahyu Hendrajaya, S.P.	19840630 201101 1 010	Penyuluh Pertanian Muda	PNS	Penata - III/c
40	Betta Dwi Isti Ferela, S.P.	19860226 201101 2 020	Penyuluh Pertanian Muda	PNS	Penata - III/c
41	Sri Mulyani, S.E.	19780509 200701 2 005	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Keuangan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
42	Budi Prayitno, S.Pt	19751202 201001 1 013	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
43	Prastyani, S.Kom	19800701 201001 2 015	Pranata Komputer Mahir	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
44	Anding Kristiono, S.Pt	19810925 201001 1 018	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
45	Siti Fathul Janah, S.Pt	19820513 201001 2 036	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
46	Purwanto, S.Pt	19821004 201001 1 015	Pengawas Bibit Ternak Mahir	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
47	Lestari Mahanani, A.Md.	19840301 201001 2 032	Penyuluh Pertanian Mahir	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
48	Alfian Arief Sudibyoy, A.Md	19870526 201001 1 006	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
			dan Kesehatan Hewan		
49	Indriya Hapsari, S.Pt	19870927 201001 2 022	Pengawas Bibit Ternak Mahir	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
50	Budi Wasito, S.Pt	19770101 201101 1 006	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
51	Natalia Paulina AM, S.Pt	19781220 201101 2 004	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
52	Agus Riyanto, A.Md.	19850318 201101 1 012	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
53	Insan Yuniarto, S.Pt	19860625 201101 1 015	Pengawas Mutu Pakan Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
54	Lia Yanu Hardi Sari, S.Pt	19870102 201101 2 015	Pengawas Mutu Pakan Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
55	Surya Andriyani Prihatiningsih, S.P.	19810908 201706 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
56	Lis Wahyu Setianingsih, S.P.	19821016 201706 2 001	Penyuluh Pertanian Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
57	Ana Rahmawati, S.T.P.	19821115 201706 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
58	Dwi Hartatik, S.P.	19821222 201706 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
59	Sri Utami .S., S.P.	19830118 201706 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
60	Jati Murdhyanto, S.P.	19830122 201706 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
61	Suluh Puji Kristanto, S.Pt.	19840328 201706 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
62	Arimanik Astagina	19850216 201706 2 001	Penyuluh	PNS	Penata Muda

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
	Sarining Wulan, S.P.		Pertanian Ahli Pertama		Tingkat 1 - III/b
63	Anansi Desriananti, S.Pt.	19851225 201706 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
64	drh. Yanida Yusup Setiawan	19910119 201903 1 010	Medik Veteriner Ahli Pertama	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
65	Aprilia Pancawati, S.T.	19860411 202012 2 004	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
66	Dhimas Bagus Sudiro Utomo, S.Kom.	19910919 202012 1 004	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Sub Bagian Keuangan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
67	Bahrul Nuzulul Rachmatulloh, S.KH.	19940228 202012 1 009	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
68	Dilla Rochimah , S.P.	19950514 202012 2 009	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	PNS	Penata Muda Tingkat 1 - III/b
69	Tri Warsono Mursito	19680418 200701 1 013	Pengolah Data dan Informasi Pada Sub Bagian Keuangan	PNS	Penata Muda - III/a
70	Suparman	19710213 200701 1 005	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum dan	PNS	Penata Muda - III/a

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
			Kepegawaian		
71	Tugimin	19740810 200701 1 012	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PNS	Penata Muda - III/a
72	Sugiarti	19751227 200701 2 009	Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PNS	Penata Muda - III/a
73	Sunaryo	19711022 200801 1 010	Operator Layanan Operasional Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PNS	Penata Muda - III/a
74	Gendro Wiyono	19760425 200902 1 005	Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PNS	Penata Muda - III/a
75	Danik Dwi Yulianti, S.T	19910707 202203 2 007	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	PNS	Penata Muda - III/a
76	Asih Indah Utami, S.P	19950629 202203 2 014	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda - III/a
77	Dwi Mayasari, S.P	19970728 202203 2 011	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PNS	Penata Muda - III/a
78	Indaryanto Mudowibawa	19861028 201001 1 013	Pengelola Layanan Operasional pada Bidang Tanaman	PNS	Pengatur Tingkat 1 - II/d

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
			Pangan dan Hortikultura		
79	Listyaningsih, A.Md.	19830512 201706 2 002	Penyuluh Pertanian Terampil	PNS	Pengatur Tingkat 1 - II/d
80	Harbudi, A.Md.	19850210 201706 1 001	Penyuluh Pertanian Terampil	PNS	Pengatur Tingkat 1 - II/d
81	Edy Purwanto, A.Md.	19850425 201706 1 001	Penyuluh Pertanian Terampil	PNS	Pengatur Tingkat 1 - II/d
82	Suwarto	19671202 200701 1 020	Pengolah Data dan Informasi Pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	PNS	Pengatur - II/c
83	Novia Nur Lailia, A.Md.	19901102 202505 2 001	CPNS Penata Laksana Barang Terampil	CPNS	Pengatur - II/c
84	Amanda Ayu Agustin, A.Md.Vet.	19990824 202505 2 002	CPNS Paramedik Veteriner Terampil	CPNS	Pengatur - II/c
85	Tarno, S.P.	19680704 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
86	Yulahono Hasnanto, S.T.P.	19680729 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
87	Agus Sugiyanto, S.P.	19690202 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
88	Nugroho Sapto Pamungkas, S.P.	19690518 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
89	Sutarjo, S.P.	19691012 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
90	Khristiyawarni, S.P.	19691104 202121 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
91	Kusmanto, S.P.	19691203 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
92	Ngadiman, S.Pt.	19691224 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
93	Sularso, S.P.	19700619 202121 1 005	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
94	Suparban, S.P.	19700624 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
95	Sutrisno, S.P.	19700909 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
96	Mujahid Hasyim Asyari, S.P.	19701005 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
97	Budi Pramiyono, S.P.	19710627 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
98	Winugraeni, S.P.	19720511 202121 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
99	Purwoto Sudarmadi, S.Pt.	19720629 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
100	Rahayu Darmawanti, S.P.	19721021 202121 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
101	Heny Sulistyowati, S.Pt.	19730107 202121 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
102	Sutarjo, S.Pt	19730203 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
103	Sardi, S.P.	19730702 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
104	Tumiyati, S.P.	19730902 202121 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
105	Wagiyem, S.P.	19740415 202121 2 005	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
106	Suyadi, S.Pt.	19740819 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
107	Aminatun Siti Qoyimah, S.P.	19740914 202121 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
108	Haryanto, S.P.	19760428 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
109	Endri Cosmiyono, S.S.T.	19760801 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
110	Rosita Natalia, S.P.	19761224 202121 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
111	Waluyo, S.T.P	19780113 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
112	Suprpto, S.P.	19790107 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
113	Suyadi, S.Pt.	19790606 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
114	Safrizal Ahmad, S.Pt.	19790801 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
115	Joko Suranto, S.P.	19791130 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
116	Agung Handayani, S.P.	19800411 202121 2 003	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
117	Tri Atmini, S.P.	19810329 202121 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
118	Fitri Rohimah, S.P.	19850620 202121 2 002	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
119	Yudhi Hartono, S.P.	19861123 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
120	Heny Rozaqi, S.P.	19880120 202121 2 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
121	Arif Priyanto, S.P.	19930623 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	PPPK Penyuluh	IX
122	R. Sri Haryono, S.Pt.	19710213 202521 1 007	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan	PPPK Teknis	IX

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
			Hewan		
123	Tugiyanto, S.Pt.	19720805 202521 1 018	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPPK Teknis	IX
124	Haryanto, S.Pt.	19721115 202521 1 009	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPPK Teknis	IX
125	Hartanto Sapto Nugroho, S.Pt.	19740915 202521 1 019	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPPK Teknis	IX
126	Sartono, S.Pt.	19751214 202521 1 012	Penata Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPPK Teknis	IX
127	Sunarso, A.Md.	19680110 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	VII
128	Wanto, A.Md.	19680805 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	VII
129	Didik Hayu Purnomo, A.Md.	19700326 202121 1 003	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	VII
130	Wiwik Dwi Sulistyowati, A.Md.	19720212 202121 2 004	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	VII

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
131	Sri Supatmini, A.Md.	19740503 202121 2 004	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	VII
132	Purwanto, A.Md.	19771105 202121 1 004	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	VII
133	Samsudin	19680111 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
134	Taryono	19680228 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
135	Darmindra	19701201 202121 1 002	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
136	Wagiman	19720530 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
137	Sularto	19731117 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
138	Tri Pudyastomo	19750517 202121 1 004	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
139	Indri Saptaningsih	19760905 202121 2 003	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
140	Sutiman	19770813 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
141	Munadi	19771109 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
142	Dwi Hariyono	19870424 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
143	Mochamad Kistywanto	19880515 202121 1 001	Penyuluh Pertanian Pelaksana/ Terampil	PPPK Penyuluh	V
144	Fransiscus Sri Suryanto, A.Md.	19750124 202521 1 013	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	PPPK Teknis	VII
145	Tri Retnowati, A.Md.	19891018 202521 2 035	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	PPPK Teknis	VII
146	Yolius Sri Haryanto	19690701 202521 1 025	Operator Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPPK Teknis	V
147	Thomas Sri Heruwanto	19730302 202521 1 019	Operator Layanan Operasional Pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	PPPK Teknis	V

b. Urusan Pangan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
1	Budi Sutresno, S.P., M.M.	19731117 200003 1 007	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	PNS	Pembina - IV/a
2	Sri Wiji Hastuti, S.P., M.M.	19691216 200701 2 013	Analisis Ketahanan	PNS	Pembina - IV/a

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
			Pangan Ahli Muda		
3	Maryono	19740227 200902 1 002	Pengolah Data dan Informasi Pada Bidang Ketahanan	PNS	Penata Muda – III/a
4	Maharestri Rahmi Widarso, S.P.	19980214 202505 2 001	CPNS - Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	CPNS	Penata Muda – III/a

c. Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
1	Ir. Sri Ambarwati, M.M.	19680103 199303 2 005	Kepala Bidang Perikanan	PNS	Pembina - IV/a
2	Satromi Nurul H,S.Pi.	19770816 200801 2 019	Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bidang Perikanan	PNS	Penata Tk.I – III/d
3	Giyarto	19750620 200801 1 012	Operator Layanan Operasional pada Bidang Perikanan	PNS	Penata Muda – III/a
4	Sofian Suyanto	19820831 201001 1 003	Operator Layanan Operasional Pada Bidang Perikanan	PNS	Pengatur Tk.I – II/d
5	Sutarni	19720820 201001 2 003	Pengelola Layanan Operasional Pada Bidang Perikanan	PNS	Pengatur - II/c
6	Sutrisno	19750615 200801 1 014	Operator Layanan Operasional Pada Bidang Perikanan	PNS	Pengatur - II/c
7	Darno	19820902 201001 1 003	Operator Layanan	PNS	Pengatur - II/c

NO	NAMA	NIP	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT/ GOLONGAN
			Operasional pada Bidang Perikanan		
8	Warjiman	19730916 201001 1 002	Operator Layanan Operasional Pada Bidang Perikanan	PNS	Pengatur Muda Tk.1 – II/b
9	Denny Kurniawan Sejati, S.Pi.	19940824 202505 1 001	CPNS - Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	CPNS	Penata Muda – III/a
10	Jihan Rizaldy Amin, A.Md.	19970318 202505 1 001	CPNS - Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	CPNS	Pengatur - II/c
11	Onivia Faradila Nur Qoirin, A.Md.Pi.	20020717 202505 2 001	CPNS - Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	CPNS	Pengatur - II/c

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Anggaran: Rp. 5.300.000,00 Realisasi: Rp. 5.300.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 dokumen	1 dokumen (100%)		
			b PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pe	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 1.625.000,00 Realisasi: Rp. 1.605.000,00 Persentase: (98,77%)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan	1 laporan (100%)		

			rencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 2 dokumen	2 dokumen (100%)	
				3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 1 dokumen	1 dokumen (100%)	
				4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 1.500.000,00 Realisasi:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan (100%)	

				Rp. 1.500.000,00 Persentase: (100,00%)	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan		
		c	PROGRAM . PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 9.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan	1 laporan (100%)	
		d	PROGRAM . PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan,	1) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 2.500.000,00 Realisasi: Rp. 2.500.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan	1 dokumen (100%)	

			Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DPA-SKPD 1 dokumen		
		e	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 14.020.000,00 Realisasi: Rp. 14.020.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 unit	20 unit (100%)	
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 223.245.000,00 Realisasi: Rp. 222.310.335,00 Persentase: (99,58%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi 1 unit	1 unit (100%)	
		f.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran:	Jumlah dokumen penatausahaan	12 dokumen (100%)	

		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 5.200.000,00 Realisasi: Rp. 5.200.000,00 Persentase: (100,00%)	arsip dinamis pada SKPD 12 dokumen			
		g PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 5.602.500,00 Realisasi: Rp. 5.602.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 unit	3 unit (100%)		
		h PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,	1) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Anggaran: Rp. 10.354.300,00 Realisasi: Rp. 10.354.300,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket	1 paket (100%)		

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 16.901.123.495,00 Realisasi: Rp. 15.862.081.806,00 Persentase: (93,85%)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 160 orang	160 orang (100%)	
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 150.800.000,00 Realisasi: Rp. 146.410.484,00 Persentase: (97,09%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan	12 laporan (100%)	

				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 1.432.760.950,00 Realisasi: Rp. 1.432.760.950,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 laporan	12 laporan (100%)		
			k . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 137.713.925,00 Realisasi: Rp. 137.711.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit	10 unit (100%)		
			l. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 1.304.750,00 Realisasi: Rp. 1.304.750,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket	1 paket (100%)		

			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Anggaran: Rp. 10.787.500,00 Realisasi: Rp. 10.787.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 paket	1 paket (100%)	
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 140.795.000,00 Realisasi: Rp. 140.795.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan	12 laporan (100%)	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 35.000.000,00 Realisasi: Rp. 35.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 4 dokumen	4 dokumen (100%)	

			Kinerja Perangkat Daerah					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PANGAN		a PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN, Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 5.490.000,00 Realisasi: Rp. 5.490.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota 1 kali	1 kali (100%)		
			b PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT, Kegiatan	1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Anggaran: Rp. 129.718.000,00 Realisasi: Rp. 126.541.966,00 Persentase: (97,55%)	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya	2 laporan (100%)		

			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		lokal 2 laporan			
			c . PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT, Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 24.250.000,00 Realisasi: Rp. 24.250.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3 ton	3.1 ton (103,33%)		
			d . PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN, Kegiatan	1) Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Anggaran: Rp. 7.480.000,00	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan	1 dokumen (100%)		

			<p>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Realisasi: Rp. 7.480.000,00 Persentase: (100,00%)</p>	<p>dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 1 dokumen</p>		
		<p>e . PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT, Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan</p>	<p>1) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 16.479.000,00 Realisasi: Rp. 16.479.000,00 Persentase: (100,00%)</p>	<p>Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota 12 laporan</p>	<p>12 laporan (100%)</p>		

			dan Harga Pangan					
			f. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 12.571.000,00 Realisasi: Rp. 12.540.000,00 Persentase: (99,75%)	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 dokumen	1 dokumen (100%)		

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN		a. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1) Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko Anggaran: Rp. 54.371.650,00 Realisasi: Rp. 54.305.650,00 Persentase:	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan	20 unit usaha (400%)		

		bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	(99,88%)	Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 5 unit usaha		
		b PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	1) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 21.468.750,00 Realisasi: Rp. 21.468.750,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 25 pelaku usaha	25 pelaku usaha (100%)	

			Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				
			c PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Anggaran: Rp. 378.134.725,00 Realisasi: Rp. 378.134.725,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas 21 kelompok	21 kelompok (100%)	
			d PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 70.480.000,00 Realisasi: Rp. 69.850.000,00 Persentase: (99,11%)	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 2 unit	2 unit (100%)	
2	PERTANIAN		a PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Anggaran: Rp. 187.152.000,00 Realisasi: Rp. 184.523.800,00 Persentase: (98,60%)	Jumlah diseminasi informasi teknis sosial ekonomi dan inovasi pertanian 3 dokumen	3 dokumen (100.00%)	

			<p>b PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN , Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</p>	<p>1) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Anggaran: Rp. 1.942.805.000,00 Realisasi: Rp. 1.820.519.136,00 Persentase: (93,71%)</p>	<p>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya 3 laporan</p>	<p>3 laporan (100.00%)</p>		
			<p>c PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER , Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular</p>	<p>1) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Anggaran: Rp. 19.361.200,00 Realisasi: Rp. 18.561.200,00 Persentase: (95,87%)</p>	<p>Jumlah Wilayah yang dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan 1 wilayah</p>	<p>1 wilayah (100.00%)</p>		

			Dalam daerah Kabupaten/Kota				
		d	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Anggaran: Rp. 14.210.537.300,00 Realisasi: Rp. 14.050.234.803,00 Persentase: (98,87%)	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 dokumen	3 dokumen (100.00%)	
		e	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, Kegiatan Pembangunan	1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 30.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 unit	1 unit (100.00%)	

			Prasarana Pertanian				
			f. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN , Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Anggaran: Rp. 12.890.000,00 Realisasi: Rp. 12.890.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 300 ha	300 ha (100.00%)	
			g. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN , Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Anggaran: Rp. 18.340.000,00 Realisasi: Rp. 18.340.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian 1 laporan	1 laporan (100.00%)	
				2) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	Jumlah pengawasan	3 laporan (100.00%)	

				Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Anggaran: Rp. 1.440.981.500,00 Realisasi: Rp. 1.410.881.500,00 Persentase: (97,91%)	penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi 3 laporan)		
				3) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan Anggaran: Rp. 17.270.000,00 Realisasi: Rp. 17.270.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan 1 laporan	1 laporan (100.00%)		
			h PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER , Kegiatan Penerapan dan Pengawasan	1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Anggaran: Rp. 13.594.000,00 Realisasi: Rp. 13.584.000,00 Persentase: (99,93%)	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 laporan	1 laporan (100.00%)		

			Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				
			i. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN , Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Anggaran: Rp. 47.676.000,00 Realisasi: Rp. 47.676.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 10 unit	10 unit (100.00%)	
			j. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN , Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Anggaran: Rp. 13.312.000,00 Realisasi: Rp. 13.312.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan 25 ha	25 ha (100.00%)	
			k. PROGRAM PENYULUHAN AN	1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah kelembagaan penyuluhan	17 unit (100.00%)	

			PERTANIAN , Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Desa Anggaran: Rp. 120.600.000,00 Realisasi: Rp. 120.400.000,00 Persentase: (99,83%)	pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya 17 unit		
		I.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN , Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten /Kota	1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Anggaran: Rp. 58.766.300,00 Realisasi: Rp. 58.736.300,00 Persentase: (99,95%)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman 2 dokumen	2 dokumen (100.00%)	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN , Kegiatan	1) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Anggaran: Rp. 433.200.000,00 Realisasi:	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan	95 orang (100.00%)	

			<p>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</p>	<p>Rp. 403.180.000,00 Persentase: (93,07%)</p>	<p>kapasitasnya 95 orang</p>		
		n	<p>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Anggaran: Rp. 20.289.250,00 Realisasi: Rp. 20.289.250,00 Persentase: (100,00%)</p>	<p>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 laporan</p>	<p>1 laporan (100.00%)</p>	
		o	<p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan Pe</p>	<p>1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Anggaran: Rp. 2.897.510.000,00 Realisasi: Rp. 2.897.510.000,00 Persentase: (100,00%)</p>	<p>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 19 unit</p>	<p>19 unit (100.00%)</p>	

			mbangunan Prasarana Pertanian					
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

H. UNSUR KEWILAYAHAN

Nihil

I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Nihil

J. UNSUR KEKHUSUSAN

Nihil

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Kementerian / LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan	
1	Urusan Pertanian	DIPA APBN Kementan melalui Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor : SP-DIPA-018.08.4.039158/2025	Pogram Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1	Pembangunan Irigasi Perpompaan 1 unit	Kelompok Tani Sumber Mulyo , Ngadiluwih, Matesih	153.000.000,-	100%	Uang ditransfer ke rekening kelompok
				2	Pembangunan Irigasi Perpompaan 1 unit	Kelompok Tani Rukun Tani III,, Gayamdompo, Karanganyar	153.000.000,-	100%	Uang di transfer ke rekening kelompok
				3	Pembangunan Irigasi Perpompaan 1 unit	Kelompok Tani Ngudi Mulyo II, , Popongan, Karanganyar	153.000.000,-	100%	Uang di transfer ke rekening kelompok

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

No	Kabupaten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
Nihil								

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tidak termasuk bidang urusan yang di tetapkan.

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	NIHIL	NIHIL
2	Sistem Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Elektronik (SEGO PETANI)	Aplikasi pelaporan petani/Petugas Penyuluh Lapang (PPL) melalui WEB http://segopetani.karanganyarkab.go.id yang memiliki nilai tambah kecepatan, efektivitas dan optimalisasi dalam pengendalian OPT. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi pengendalian OPT Elektronik menggunakan aplikasi SEGO PETANI dan pembentukan POPT swadaya
3	SIEMPOK	Sistem Informasi Produk Organik Karanganyar Aplikasi dengan smartphone (Whatsapp Bisnis, IG @siempokkaranganyar, FB Siempok Karanganyar) yang sederhana, aman, mudah dan murah untuk memperoleh produk pangan organik yang lebih baik proses produksinya, kualitas, dan keamanannya terjamin dengan sertifikasi yang jelas.

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional Tahun 2025 Juara I	Badan Pangan Nasional
2	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Klasifikasi baik dan di atas skor PPH Nasional Tahun 2024	Badan Pangan Nasional
3	Indek Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten	Badan Pangan Nasional
4	Indek Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten	Badan Pangan Nasional
5	NIHIL	
6	Kabupaten Dengan Ketahanan Pangan Terbaik Periode 2018-2020	Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Jakarta, 7

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
		April 2021
7	Petani Porang Berprestasi Tingkat Nasional , Peringkat II, Kelompok Taruna Tani Porangsari Ds. Tawangsari Kec. Kerjo	Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Tanaman Pangan

BAB VIII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang telah di targetkan. Anggaran yang diterima dari APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebesar Rp. 41.299.360.095,- terealisasi sebesar Rp. 39.904.691.705,- (96,62%), secara fisik terealisasi sebesar 99,98%.

Selain mendapatkan anggaran dari APBD Kabupaten, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan juga mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yang diterima melalui Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, juga dari APBD Provinsi Jawa Tengah, yang diterimakan dalam bentuk barang dan sebagian ada yang diterimakan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening kelompok.

B. SARAN

1. Perlu upaya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus dimasa akan datang. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak di lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Karanganyar, 31 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar



Dr. Feriana Dwi Kurniawati, S.P., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19810226 200501 2 015